

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Ulil Albab Nur

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Ulilnur16040674095@gmail.com

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tjijikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kota Kediri ingin meningkatkan pembangunan daerah dengan konsep pemberdayaan. Hasil dari Penelitian ini menjabarkan bagaimana pelaksanaan percepatan pembangunan melalui Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dikaji menggunakan 4 tahapan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di kemukakan (Mardikanto, 2010) yaitu Seleksi Lokasi, Sosialisasi, Proses Pemberdayaan dan Pemandirian. Data dari penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh dari hasil interview dan data sekunder diperoleh dari literatur dokumentasi, dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan perangkaian kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam 1) Proses seleksi program daerah masyarakat sangat aktif dalam mengusulkan program pembangunan yang di inginkan mulai dari infrastruktur yaitu renovasi jalan, mushola dan pos kamling. Sosial Ekonomi di alokasikan untuk sembako, keperluan sekolah bagi anak dari keluarga tidak mampu. 2) Pelaksanaan Proses Sosialisasi dari pihak Kelurahan dengan secara intensif mengundang masyarakat agar selalu datang saat sosialisasi PRODAMAS. 3) Proses Pemberdayaan, masyarakat saling gotong royong dari segi pikiran, tenaga sampai bantuan konsumsi untuk para pekerja. 4) Kemandirian Masyarakat Bujel terlihat dalam kegiatan seperti pembuatan proposal PRODAMAS oleh para Ketua RT, belanja material dan tenaga kerja yang di tangani langsung oleh warga Bujel. Walaupun ada kekurangan dalam pelaksanaan PRODAMAS di Kelurahan Bujel seperti belum maksimalnya penggunaan dana bidang ekonomi dikarenakan kurang minat nya masyarakat Kelurahan Bujel dalam berkegiatan wirausaha.

Kata Kunci: Fasilitasi, Pemberdayaan, Percepatan Pembangunan.

Abstract

Kediri Mayor Regulation No.40 of 2014 concerning the Community Empowerment Facilitation Program (PRODAMAS) of the City of Kediri wants to enhance regional development with the concept of empowerment. This study aims to describe the implementation of accelerated development in the community empowerment facilitation program (PRODAMAS), Bujel Village, Mojoroto District, Kediri City. The approach of this research is descriptive qualitative. This research was examined using 4 stages of Community Empowerment as stated by (Mardikanto, 2010), namely Location Selection, Socialization, Empowerment and Independence Process. Data from this study consisted of primary data obtained from interviews and secondary data obtained from documentation, literature, and books related to research. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study showed that in 1) the process of regional program selection was very active in proposing the desired development program starting from infrastructure, namely renovation of roads, prayer rooms and security posts. Socio-Economic allocated for food, expanding schools for children from disadvantaged families. 2) Implementation of the Socialization Process from the Kelurahan by intensively inviting the community to always come when the PRODAMAS socialization. 3) Empowerment Process, the community works together in terms of mind, energy and consumption assistance for workers. 4) Independence of the Bujel Community is seen in activities such as making PRODAMAS proposals by the RT Heads, spending on materials and labor handled directly by Bujel residents. Although there are deficiencies in the implementation of PRODAMAS in the Bujel Kelurahan, such as the lack of economic use due to lack of interest in the Bujel Kelurahan community in entrepreneurial activities.

Keywords: Facilitation, Empowerment, Acceleration of Development.

PENDAHULUAN

Negara-Negara berkembang seperti Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan berikutnya (Wibisono & Tukiman, 2017). Pembangunan merupakan rangkaian upaya kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka dari itu keikutsertaan warga untuk pelaksanaan pembangunan begitu dibutuhkan, sebab wargalah yang menerima hasil dan manfaat dari suatu kebijakan. Strategi pembangunan melalui keikutsertaan warga secara keseluruhan disebut sebagai pembangunan yang berfokus pada masyarakat (*people-centred development*) (Sumaryadi, 2005). Pembangunan infrastruktur mempunyai banyak pengaruh di negara-negara berkembang karena mereka dapat meningkatkan standar hidup penduduk lokal dan membantu mereka memiliki akses ke sumber daya yang langka (Magsi & Torre, 2012).

Global Competitiveness Report 2015-2016, yang disusun oleh lembaga World Economic Forum (WEF) <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381>, Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 140 negara pada sektor pembangunan infrastruktur, peringkat yang bisa dikatakan pada standart rata-rata, yang berdampak dengan munculnya beberapa beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia. Fariani menyatakan dalam penelitiannya bahwa pada saat ini Indonesia tengah berusaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah yang ada di tanah air. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan usaha tidak hanya mempercepat proses pembangunan disuatu daerah, namun juga untuk membangun masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan (Fitriani, 2014).

Pemerintah telah memberikan dasar hukum kepada pemerintah daerah melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan Pemerintah Oleh Pemerinth Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dengan menggunakan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keinginan untuk segera mencapai keberhasilan dalam pembangunan, maka semua program mulai dari program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan peran masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan

memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka (Sigalingging & Warjio, 2014), dan tujuan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan ialah masyarakat mampu untuk berdaya dan kemampu atau kemampu atau kekuatan (Eger, Miller, & Scarles, 2018). Kekuatan yang di maksud adalah dapat di lihat dari aspek aspek yang mengarah pada material dan fisik, kelembagaan, ekonomi, kerjasama, komitmen dan kekuatan intelektual untuk menerapkan prinsip pemberdayaan (Widjajanti, 2011).

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II Pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Insitut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) dalam laman<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasional> lppn yang menjelaskan tentang suatu daerah yang melakukan perencanaan pembangunan nasional khususnya, perlu diperhatikan beberapa aspek yang matang dalam menentukan keputusan apa yang akan dipilih dan digulirkan dalam suatu pemerintahan. Aspek-aspek tersebut berguna untuk lebih memberikan gambaran utama dan isi dari keputusan tersebut. Beberapa aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya tranparansi dalam setiap proses perencanaan pembangunan
2. Terintegrasinya Perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah ke dalam kedalam jangka panjang guna menyerap aspirasi untuk program yang bisa berubah sewaktu waktu mengikuti globalisasi seperti perkembangan teknologi, ekonomi.
3. *Quality Control* pada kualitas data dan informasi yang terupdate dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya yang di sampaikan oleh Ir. Rina Agustin Indriani, MURP Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai Program Gerakan 100-0-100 yang mana program ini ingin Mewujudkan *Sustainable Development Goals* 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 semua target diharapkan sudah tercapai diantara lain :

1. Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;
2. Akses layanan infrastruktur dasar;
3. Pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan.
4. Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan;
5. Layanan ruang publik yang memadai;

Kediri sebagai salah satu Kota di Jawa Timur juga memiliki Program Pembangunan yang fokus pada infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang disebut Prodama. Prodama adalah Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kota Kediri, sehingga perekonomian Kediri dapat ditingkatkan. Prodama juga dikenal sebagai program 50 juta per RT (wilayah kecil kota Kediri) per tahun (Setianingsih & Aalin, 2020).

Pemerintah kota Kediri membuat Prodama yang terancang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 s/d 2019. Prodama ini adalah realisasi dari janji politik saat kampanye lalu di tuangkan dalam visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri periode 2014 s/d 2019 yang mana cita-cita PRODAMAS tercantum dalam Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 2) Memkoordinir warga dalam menjelaskan prioritas dan menganalisis permasalahan yang ada;
- 3) Melibatkan dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk bergabung aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- 5) Peningkatan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;

Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan sebesar Rp.50 Juta untuk setiap masing-masing RT, dengan pembagian 60% untuk Infrastruktur, 40% Sosial-Ekonomi (Debby & Ardini, 2019) Perwali Kediri Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan Prodama dialokasikan

untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan renovasi fasilitas umum sedangkan ekonomi dan sosial bisa di alokasikan untuk pengadaan bibit tanaman, benih ikan, pelatihan ketrampilan, peralatan keagamaan, peralatan pertemuan ditingkat RT, pemberian santunan kepada penduduk miskin lanjut usia, dan lain-lain

Sumber dana yang di anggarkan pada Prodama ini dianggarkan dari APBD Pemerintah Kota, dengan kurang lebih keseluruhan APBD Pemerintah Kota Kediri mencapai 1,3 Triliun Rupiah yang bersumber dari 1,1 Triliun Rupiah di peroleh dari Negara dan 200 Milyar Rupiah merupakan pendapatan Daerah, dari jumlah tersebut PRODAMAS mendapatkan jatah sebesar yaitu 77 Milyar Rupiah. (Farhan A.A, dkk., 2017)

Pemerintah sangat optimis dalam Pelaksanaan yang mana di masa mendatang masyarakat mampu bukan lagi hanya sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) tetapi berubah menjadi pemilik kepentingan. Pemerintah sangat optimis akan ketersediaan fasilitas yang memadai di semua belahan kota sampai ke pelosok wilayah Kota Kediri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya (Heni Sulistiyowati, 2018). Pembangunan sering menjadi tidak efisien dan efektif karena kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menerima pembangunan, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit (Posumah, 2015). Menurut Nadir dalam Otonomi daerah dan politik pelibatan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa untuk dapat menunjukkan keberadaannya melalui berbagai aktivitas dalam pengelolaan persoalan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat. Artinya berbagai persoalan serta kebutuhan desa akan dikelola sesuai dengan apa yang menurut warga desa penting dan dibutuhkan oleh masyarakat (Nadir, 2013).

Prodama digunakan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah di tingkat Rukun Tetangga (RT) yang saat ini mulai terlihat hasilnya, dilansir dari <https://radarkediri.jawapos.com/> pada tanggal 11 April 2019 Kota Kediri berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Penghargaan yang di dapatkan saat itu sebagai Kota Terbaik dalam Percepatan Pembangunan. Salah satu indikatornya adalah inovasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berupa Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

Pemerintah Kota Kediri melakukan terobosan dengan meningkatkan level Prodama yang awalnya hanya sebuah kebijakan pemerintah kepada tingkat persaingan/kompetisi antar RT se-Kota Kediri. Kompetisi ini ada pada wadah Prodama Award. Prodama Award

yang sudah memasuki tahap ketiga ini, telah melibatkan setidaknya 1.447 RT se-Kota Kediri. Setiap RT akan berkompetisi untuk memperebutkan gelar terbaik dalam bidang-bidang yang sudah ditentukan Pemkot Kediri. Mulai dari bidang pembangunan infrastruktur, bidang, sosial, dan bidang ekonomi. Terdapat juga bidang khusus yang bisa diperebutkan oleh RT, yaitu bidang partisipasi masyarakat dan kinerja ketua RT. Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menjadi salah satu lingkungan kelurahan yang telah mengimplementasikan dan mempunyai prestasi yang baik terhadap Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Bujel ternyata telah diwujudkan dalam bentuk perbaikan jalan di Kelurahan Bujel, pembangunan gapura, pembangunan pos kampling, tempat ibadah, Penyaluran Sembako dan lainnya.

Penelitian berlokasi di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang dalam pelaksanaan PRODAMAS sering di tunjuk Pemerintah Kota Kediri untuk menjadi rujukan kelurahan lain yang ingin belajar/Konsultasi nonformal lebih dalam tentang Prodamas. Kelurahan Bujel juga dalam dua tahun berturut turut (2018-2019) mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Kediri sebagai kelurahan yang dalam melaksanakan PRODAMAS dinilai berjalan dengan baik. Prodamas Award 2019 yang bertempat di GOR Jayabaya Kota Kediri mengumumkan bahwa Kelurahan bujel unggul dalam kategori Kinerja RT terbaik dan Kategori Partisipasi Masyarakat (JawaPos, 2019).

Hasil observasi awal di kelurahan bujel menyatakan bahwa ada beberapa fakta tentang kekurangan Prodamas di kelurahan Bujel :

1. Realisasi Prodamas melibatkan pemberdayaan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pembuatan laporan kegiatan. Tetapi masih ada beberapa masyarakat Kelurahan Bujel yang ikut serta dalam proses pelaksanaan Prodamas.
2. Beberapa pembangunan infrastruktur seperti Pos Kampling, tempat pembuangan sampah dan gorong gorong yang dalam hal pemanfaatan dan perawatannya masih kurang maksimal.
3. Sering usulan pada saat rembug warga tidak terealisasi karena diluar batas anggaran Prodamas.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang Pemberdayaan masyarakat dalam Program Pemerintah. Farhan (2017) dalam penelitiannya membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Prodamas. Berdasarkan hasil penelitiannya

adanya Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ternyata bisa menaikkan animo masyarakat dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur serta penggelolaannya (Farhan A.A, dkk., 2017). Sedangkan menurut Setianingsih & Aalin (2020) yang fokus meneliti tentang dampak pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur menggunakan dana Prodamas. Berdasarkan hasil penelitiannya Dana alokasi infrastruktur tidak dapat memberikan dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi jika tidak diikuti oleh fasilitas transportasi dari lokasi produksi ke pasar. Karena pembangunan infrastruktur tanpa konsep produk ekonomi yang matang tidak akan memiliki dampak ekonomi langsung pada masyarakat (Setianingsih & Aalin, 2020). Ahmad Sururi (2015) dalam penelitiannya yang membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terilat bahwa pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik, apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan rencana kerja program yang diimplementasikan. Kendala seperti kurangnya informasi kepada masyarakat tentang makna pemberdayaan masyarakat dan keberadaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat menyangkut kondisi dan lingkungannya masih di temui peneliti saat mewawancari para warga setempat, sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan dan berlakunya budaya kepatuhan masyarakat terhadap penguasa wilayah (tokoh formal maupun informal) yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kebijakan pengambilan keputusan (Sururi, 2015).

Penelitian ini mengkaji tentang “Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan (studi pada Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.” Studi ini melihat dengan adanya program bantuan ini, proses percepatan pembangunan di Kota Kediri bisa merata dan mencakup semua dari susunan paling bawah yaitu Rukun Tetangga (RT).

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penilitan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena (Ma'ruf, 2016) Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bujel

Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori 4 tahapan pemberdayaan masyarakat milik Totok Mardikanto yaitu seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan dan pemandirian masyarakat (Mardikanto, 2010).

Proses pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri guna memperoleh data dan informasi yakni melalui tanya-jawab terstruktur, pengamatan di lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam (Sugiyono, 2012).

Sumber data penelitian ini meliputi: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dengan mengambil lokus penelitian di Kantor Kelurahan Bujel. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atas dasar kesesuaian serta keterlibatan dalam fokus penelitian yang diangkat. Adapun informan informan yang peneliti wawancarai guna menunjang proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pak Lurah Bujel
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Bujel
3. Bendahara Kelurahan Bujel
4. Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Bujel
5. Warga Kelurahan Bujel
6. Pendamping PRODAMAS Kelurahan Bujel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) merupakan Program untuk menumbuhkan, mengembangkan, menggerakkan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pedoman pelaksanaan agar arah pelaksanaan bisa terarah dan terakomodir dalam satu tujuan.

Misi dari Prodama adalah kegiatan satu pembaharuan sistem pembangunan Kota Kediri. Pembaharuan sistem pembangunan yang bersifat *top down planning* atau kehendak pusat dimana pemerintah sebagai obyek utama menjadi pembangunan yang bersifat *bottom up planning* atau menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator.

Sebagai program pembangunan yang menempatkan masyarakat menjadi sebagai dalam utama, pemerintah Kota Kediri meluncurkan Prodama dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan dan menggerakkan perilaku pada masyarakat untuk gotong royong dalam kegiatan pembangunan wilayah.
- 2) Menjelaskan kepada masyarakat dalam memilih kebutuhan dan membantu mengidentifikasi masalahnya.
- 3) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di wilayah Rukun Tetangga.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.
- 5) Meningkatkan keterlibatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan (perwali 2014 kota Kediri).

Alokasi anggaran Prodama sebesar Rp.50.000.000 untuk setiap Rukun Tetangga. Adapun dana tersebut dibagi menjadi 60% infrastruktur dan 40% sosial ekonomi dengan ketentuan berikut:

1. Kegiatan Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b nomor 1 digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana minimal 60 % (enam puluh persen) dari pagu dana Prodama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.
2. Kegiatan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2 digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.
3. Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 3 digunakan untuk tunjangan sosial dan peralatan kegiatan sosial di masyarakat dalam skala mikro.

Prinsip-prinsip pengelolaan Prodama meliputi :

- a. Transparansi pada seluruh jenis kegiatan dan bisa diketahui oleh semua warga dengan menggunakan berbagai platform.
- b. Akuntabel semua kegiatan wajib untuk dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif dan hukum.
- c. Partisipatif seluruh masyarakat dilibatkan wilayah RT berperan aktif dalam setiap rangkaian kegiatan dengan berlandaskan rembug warga sebagai suara pada pengambilan keputusan tertinggi.
- d. Berkelanjutan manfaat dari hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berjangka panjang.

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri peneliti dianalisis berdasarkan 4 tahapan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di kemukakan oleh (Mardikanto, 2010) yaitu Seleksi Lokasi, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Proses Pemberdayaan dan Pemandirian Masyarakat. Berikut adalah uraian hasil penelitian penulis:

1. Seleksi Daerah Pelaksanaan

Seleksi di lakukan dengan dasar kriteria yang sudah di sepakati oleh pihak terkait dan masyarakat. Pemilihan lokasi di nilai penting supaya pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus diberdayakan. (Mardikanto, 2010)

Seleksi Daerah Pelaksanaan Program di lingkungan yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu pembangunan. Pemilihan program yang diawali dengan memilih rancangan pembangunan yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mendapat suatu kesepakatan antar warga. Pada tahap ini masyarakat di berdayakan secara pemikiran untuk mengusulkan/menyampaikan pendapatnya tentang daerah RT mana yang cocok untuk di realisasikan program pembangunannya tersebut. Pada tahap ini, masyarakat sangat di butuhkan kontribusinya. Karena masyarakat daerah itu sendiri yang mengetahui kebutuhan wilayahnya. Perangkat Kelurahan menjelaskan tentang tahap awal pelaksanaan Prodamas. Pak Mujiyo yang merupakan Lurah dari Kelurahan Bujel menyampaikan,

“Pembangunan Prodamas yang pertama kali di lakukan pada Tahun 2015, tapi rembug warga di lakukan setiap RT di lingkungan Bujel pada tahun 2014. Kalau rembug warga memang sudah di lakukan setahun sebelum di ajukan ke pusat. Semua usulan warga di tampung dan di koordinasikan ke pihak Kelurahan melalui perwakilan Ketua Rukun Tetangga. Pada saat rembug warga pihak Kelurahan biasanya di wakili oleh Pak Lurah, Bendahara Kelurahan, Pendamping PRODAMAS lalu dari pihak masyarakat yaitu Pak Rt dan pastinya semua lapisan warga.”

Gambar 1. Rembug Warga yang di wakili oleh Ketua RT lingkungan Kelurahan Bujel



Sumber : Arsip Dokumentasi Prodamas Kelurahan Bujel Kota Kediri

Proses yang terjadi selama rembug warga adalah masyarakat bisa mengusulkan semua keinginan yang menurut masyarakat Kelurahan Bujel sangat di butuhkan di wilayah Rukun Tetangganya. Rembug warga di lakukan untuk menampung aspirasi warga dalam pelaksanaan Prodamas. Namun tidak semua usulan dari warga dapat di laksanakan. Penetapan daerah mana yang menjadi penarapan program apa saja yang di setuju akan di realisasikan melalui banyak proses, dimana pihak kelurahan yang meliputi Bendahara staff PPTK dan Pendamping Prodamas Kelurahan Bujel juga ikut andil dalam pemilihan program walaupun suara terbanyak tetap di miliki oleh masyarakat daerah yang akan di realisasikan programnya. Yang mana aspek aspek seperti urgenitas, biaya alokasi dan juga manfaat jangka panjang menjadi aspek terpenting dalam pengusulan program agar pembangunan yang di lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat secara maksimal. Jadi untuk usulan yang belum di terima dapat di usulkan pada rembug warga di tahun berikutnya jika menurut warga usulan tersebut memang sangat urgent dan berguna bagi warga sekitar.

Pada 5 tahun pelaksanaan Prodamas Seluruh Rukun Tetangga di Kelurahan Bujel serentak menjadikan Prodamas sebagai proram untuk memperbaiki jalanan yang ada di wilayahnya dengan pavingisasi pada setiap gang, dan renovasi Pos Kamling. Masyarakat memilih program tersebut karena mereka merasa jalanan yang ada di wilayahnya dulunya hanya jalan biasa yang membuat jika ada angin debunya akan masuk ke dalam pekarangan rumah warga, untuk pos kamling mendapat renovasi dengan memberi penerangan dll agar masyarakat yang bertugas untuk ronda merasa nyaman dan betah di pos kamling. Bapak Parji Staff Kelurahan Bujel mengatakan saat jalanan dan pos kamling sudah selesai, biasanya

untuk tahun selanjutnya masyarakat mulai merambah ke hal lain untuk mengalokasikan 60% dana Prodama seperti Renovasi Balai Temu Warga, pembangunan Gapura, pemasangan lampu jalan Kelurahan dan lainnya.

Seperti contoh RT003 RW003, banyak usulan yang telah terealisasi diantaranya lain yaitu, pembuatan gorong gorong, pembelian tikar, Lampu, sajadah dan *sound system* untuk Mushola. Menurut Bapak Khoirudin yang menjabat sebagai Ketua RT RT003 RW003. Pemilihan wilayah RT 003 RW006 untuk program pembuatan saluran air yaitu berlatar belakang kawasan RTnya belum mempunyai saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang sering membuat kawasan tersebut sering terkena banjir saat musim hujan. Ditambah fasilitas mushola yang perlu di ganti karena sudah tidak layak pakai yang membuat masyarakat kurang nyaman saat beribadah.

Perencanaan penggunaan 40% dana Prodama untuk Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Bujel pemilihan pada tahun 2015-2019 tidak menggunakan sistem pemilihan daerah tetapi di samartakan, warga sepakat menjadikan dana Sosial Ekonomi tersebut berfokus untuk penyaluran dana santunan kepada Lansia dalam bentuk sembako, pemberian makanan 4 sehat 5 Sempurna dan vitamin kepada Balita saat pelaksanaan posyandu dan juga pemberian peralatan sekolah. Ibu Suparlik sebagai staff kelurahan Bujel menggaris bawahi kalau Setiap Penerima bantuan sosial ekonomi harus masuk pada Basis Data Terpadu (BDT) Kota Kediri.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi adalah cara untuk memberikan info kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses Sosialisasi menjadi penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikomunikasikan (Mardikanto, 2010).

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat merupakan langkah untuk menjelaskan proses pemberdayaan Prodama kepada masyarakat. Melalui proses sosialisasi akan membantu pihak kelurahan dan jajarannya yang bertanggung jawab untuk menjabarkan semua aspek yang ada dalam Prodama kepada masyarakat agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya hambatan dalam pelaksanaan Prodama.

Dalam wawancara dengan pendamping Prodama Kelurahan Bujel Bapak Ari menjabarkan tentang sosialisasi yang terjadi di Kelurahan Bujel: "Dalam kegiatan Prodama di Kelurahan Bujel sosialisasi dilakukan oleh pihak Kelurahan kepada masyarakat untuk

persiapan pengeksekusian dari aspirasi yang di berikan saat rembug warga. Sosialisasi biasanya di gunakan oleh Kelurahan untuk memberitahukan kepada masyarakat program apa saja yang akan di realisasikan dan manfaat yang akan di dapat oleh masyarakat dari program tersebut.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Bapak Ghofur selaku warga RT 02 RW 05 tentang keikutsertaan masyarakat dalam rapat Prodama yang menyatakan warga Bujel pada dasarnya mau untuk ikut andil dalam pelaksanaan Prodama, meskipun presentase keikutsertaan belum mencapai 100% dikarenakan terhalang jam kerja kantor ataupun pabrik. Tetapi dalam segala kegiatan presentase kehadiran warga minimal diatas 50%.

Gambar 2 Masyarakat mengisi daftar hadir dalam rapat PRODAMA



Arsip Dokumentasi Prodama Kelurahan Bujel Kota Kediri.

Langkah dalam meningkatkan kehadiran masyarakat untuk Sosialisasi Prodama, pihak Kelurahan menggunakan berbagai cara agar masyarakat berkenan hadir dalam rembug warga, salah satunya dengan memberikan undangan pintu ke pintu. Cara ini di nilai efektif oleh staff PPTK kelurahan bujel karena dengan di berikannya undangan secara langsung, masyarakat akan merasa di butuhkan kehadirannya, cara ini terbukti efektif dengan naiknya presentase daftar hadir dalam setiap rapat Prodama di Kelurahan Bujel.

Lurah Bujel Bapak Mujito menambahkan pada sesi sosialisasi juga akan di mediasi jika ada wilayah RT yang ingin mengusulkan penambahan dana pada suatu bidang. Ini di dasari oleh pernyataan beliau bahwa Kelurahan Bujel terdapat sedikit kekurangan dalam segi penggunaan dana pada bidang ekonomi. Dimana masyarakat kurang maksimal dalam mengelola dana terhadap bidang pengembangan UKM milik Kelurahan Bujel dikarenakan kurang maksimalnya pelatihan bagi Ibu PKK dan seringkali terbentur dengan jadwal kerja para ibu PKK, yang mana pada tahun 2016 berujung pada kesepakatan Dana Bidang Ekonomi di masukan sebagai tambahan Bidang Sosial. Tidakan ini di perbolehkan oleh pihak PPTK dengan syarat seluruh masyarakat yang hadir saat rapat sepakat untuk di alihkan dana Bidang Ekonomi ke Bidang Sosial. Bapak Mujiyo mempunyai keinginan untuk

Prodama selanjutnya akan memaksimalkan Dana Bidang Ekonomi untuk menaikkan angka perekonomian warganya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Sosialisasi diadakannya Sosialisasi Prodama di Kelurahan Bujel sangat penting dalam kaitan mendukung keberhasilan program. Karena dalam tahap ini masyarakat akan di jabarkan apa saja program yang akan di realisasikan dan informasi penting terkait Prodama untuk segi keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi bisa di katakana berjalan dengan baik dan juga masyarakat Bujel sangat antusias dalam perencanaan kegiatan awal Prodama. Walaupun sempat masih ada kendala dengan banyaknya warga tidak hadir saat rapat, tetapi jumlah warga yang datang saat rapat sudah di kategorikan cukup untuk mewakili warga. Berjalannya waktu masalah kehadiran dalam sosialisasi dapat diatasi oleh Pihak Kelurahan Bujel.

3. Tahap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk Mengembangkan *softskill* dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya (Mardikanto, 2010). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut ini

- a. Meneliti dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.
- b. Merancang plan kegiatan masyarakat.
- c. Menerapkan rencana kegiatan.
- d. Memonitoring proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME).

Proses pelaksanaan PRODAMAS dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Dalam proses ini sumber daya manusia di wilayah Bujel di berdayakan guna memperlancar pelaksanaan PRODAMAS.

Staff Kelurahan Bujel Ibu Suparlik menjelaskan bahwa dalam proses Pelaksanaan PRODAMAS sangat di anjurkan semua tenaga kerja di dapatkan dari masyarakat bujel sendiri. Contoh seperti pembangunan pavingisasi di jalan yang ada di Bujel mulai dari pembelian bahan baku, tukang sampai yang ngasih makanan buat tukang itu semua dari masyarakat sendiri jadi konsep gotong royong antar warga RT di nilai efektif karena mereka sendiri yang membangun jalannya otomatis ada hal lain yang muncul yaitu kerukunan warga dan juga rasa memiliki atas jalan tersebut sehingga nanti mereka dapat merawatnya agar jalan tersebut bisa bertahan lama dan tetap bagus. Kadang bukan hanya para orang tua yang ikut kerja, remaja dari Kelurahan Bujel juga ikut serta untuk menghias jalan agar bagus dan berwarna bukan hanya hitam seperti biasanya.

Warga Kelurahan Bujel bernama Bu Sroh mengatakan bahwa :

"Masyarakat selalu di berdayakan dalam semua aspek persiapan Prodama Warga e Bujel sregep mas nek di libatkan program koyok ngene, soale kan nek program e dadi wargae dewe seng ngerasakno seng nggawe seng menfaatno pole seneng seneng ae"

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam tahap realisasi program yang di usulkan warga saat musyawarah rembug warga, masyarakat bujel sangat antusias dan bisa di ajak gotong royong. Dalam hal fisik masyarakat berkontribusi dengan terjun langsung dalam pelaksanaannya, mulai dari pembelian barang penunjang pembangunan dengan catatan di damping oleh salah satu staff PPTK atau pendamping Prodama, pekerja seperti tukang di anjurkan memang dari masyarakat kelurahannya sendiri, seperti pengerjaan pembangunan pavingisasi di berbagai gang yang ada di Kelurahan bujel, masyarakat setempat bergantian dengan system piket untuk mengerjakan pemasangan paving selama kurang lebih 1 minggu.

Gambar 3. Pelaksanaan Pavingisasi di RT 005 RW 005



Sumber : Arsip Dokumentasi Prodama Kelurahan Bujel Kota Kediri.

Dalam kasus lain, jika dari semua masyarakat tidak ada yang mempunyai keahlian tertentu di bolehkan oleh pemerintah kelurahan untuk mengambil pekerja profesional seperti saat pemasangan listrik tambahan untuk jalan yang mana memang harus di datangkan dari PLN. Novita (2017) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak memunculkan kesenjangan gender antara pria dan wanita. Hal ini dikarenakan antara pria dan wanita gotong royong dalam

menghasilkan pembangunan yang baik. Hal ini sejalan dengan dengan Ibu Suwartini Sebagai warga RT 001 RW 006 Kelurahan Bujel menambahkan dalam hal konsumsi kalau ibu-ibu Kelurahan Bujel juga secara bergantian memberikan minuman serta camilan ringan untuk para pekerja, untuk hal ini beliau mengatakan kalau tidak ada jadwal siapa yang harus memberikan makanan serta menu apa yang di berikan semuanya atas dasar sukarela seadanya dan di niati untuk sedekah juga. Berdasarkan pemaparan diatas proses kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Perwali 2014.

4. Pemandirian Masyarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah langkah akhir dalam pemberdayaan. Hasil dari pemberdayaan adalah menyiapkan masyarakat supaya masyarakat mampu mengatur kegiatannya dikeranakan prinsip dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memendirikan. (Mardikanto, 2010).

Pak Mujiyo yang menjabat sebagai Lurah dari Kelurahan Bujel bahwa warga Kelurahan Bujel sudah cukup bisa dikatakan mandiri dalam pelaksanaan Prodamas. Karena dalam setiap proses yang laksanakan, kontribusi dari luar warga bujel sangatlah kecil. Semua yang sekiranya bisa di *handle* sendiri seperti pembuatan proposal Prodamas yang di tangani langsung oleh para Ketua RT dengan pengawasan pendamping Prodamas, belanja keperluan Program, pengerjaan Program sampai pembuatan laporan yang di damping oleh staff PPTK dan Pendamping Prodamas. Menurut bapak Suprayogi Staff Kelurahan Bujel, peran para Pendamping Prodamas Kelurahan Bujel yang juga warga asli Kelurahan Bujel sangat membantu para Ketua RT dalam setiap proses pelaksanaan Prodamas, mula dari Merancang Program diaman tugas nya menjadi konsultan para warga dalam menentukan material yang di pakai saat pembangunan infrastruktur, dalam Sosialisasi Program pendamping Prodamas membantu para pegawai kelurahan untuk menjelaskan kepada warga program apa yang akan di jalankan dan apa saja manfaat dari program tersebut, Serta pada saat eksekusi program Pendamping Prodamas akan ikut memantau jalannya program dibantu oleh Ketua RT terkait sampai pembuatan laporan Prodamas.

Pak Mujiyo juga menambahkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) PLUS pada tahun 2021 setiap RT di Kota Kediri akan mendapat suntikan dana sebesar 100 juta (Seratus Juta Rupiah). Program ini adalah *Upgrade* dari PRODAMAS Tahun 2014-2019. Dalam PRODAMAS PLUS masyarakat akan lebih di bimbing lagi dalam hal kemandirian untuk mengelola Prodamas, baik dari sisi pelaksanaan atau dalam hal

pengembangan program yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suparlik selaku staff PPTK Kelurahan Bujel menyebutkan bahwa Podamas PLUS akan membuat masyarakat lebih mandiri dibandingkan Prodamas 2014-2019. Dikarenakan pihak kelurahan yang selama ini ikut andil dalam setiap pelaksanaan kegiatan kedepannya akan hanya menjadi pengawas program dan penerima laporan semua proses akan di kelola langsung oleh masyarakat yang di komando oleh Ketua RT.

Sejalan dengan penelitian dari Sururi (2015) yang mengkaji tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimana dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa dalam sektor pembangunan yang di gabung dengan pemberdayaan bisa mendorong agar masyarakat dapat memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar yang ada di wilayahnya dan mengetahui tentang program yang sedang di jalankan. Pengetahuan masyarakat terhadap program kelak dapat membantu partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program hingga pengawasan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis mengenai Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. diatas, dapat dilakukan penarikan beberapa kesimpulan berdasarkan temuan serta data yang diperoleh peneliti sebagai berikut

1. Seleksi Daerah Pelaksana

Dalam pemilihan program bagi setiap wilayah Rukun Tetangga (RT), masyarakat Kelurahan Bujel bisa di katakana aktif dan memberikan banyak aspirasinya untuk pelaksanaan Prodamas di wilayahnya, dan selama pelaksanaan Prodamas di Kelurahan Bujel berjalan, program-program yang di usulkan memang sedang di butuhkan oleh masyarakat Kelurahan Bujel seperti perbaikan jalan pembangunan gapura, pos kamling renovasi tempat ibadah, pemberian santunan warga kurang mampu keperluan sekolah anak-anak dan lain sebagainya.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi Prodamas di Kelurahan Bujel pada tahun pertama menemukan hambatan berupa banyaknya masyarakat yang tidak berkenan hadir dalam rapat Prodamas baik rembug warga maupun Sosialisasi program yang di setuju untuk di realisasikan. Tetapi pihak Kelurahan Bujel merubah cara untuk menarik

massa dalam Sosialisasi Prodama yang awalnya hanya di beritahu oleh Ketua RT, tetapi untuk sekarang pihak Kelurahan Bujel mengeluarkan Undangan untuk setiap lapisan masyarakat dan cara itu dilihat berhasil karena semenjak diberikan surat undangan pribadi, dalam setiap sosialisasi Prodama tingkat kehadiran bisa di atas 50% yang menurut Bapak Lurah Bujel sudah bisa di kategorikan cukup untuk mewakili warga.

3. Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Prodama di Kelurahan Bujel berhasil mendorong keikutsertaan warga Bujel dalam kesuksesan Prodama. Berbagai sub bidang pekerjaan, dimulai dari brainstorming ide kegiatan, penentuan kegiatan baik infrastruktur maupun sosial ekonomi serta pengelolaan program warga Bujel melibatkan diri dalam pelaksanaannya.

4. Pemandirian Masyarakat

Kelurahan Bujel melaksanakan Prodama dengan tingkat kemandirian yang sangat baik. Setiap proses dalam pelaksanaan program, warga Bujel selalu terlibat dan bertindak secara mandiri. Masyarakat sendiri mengusulkan apa saja yang akan dilakukan dengan dana Prodama baik sektor Infrastruktur maupun Sosial Ekonomi.

B. SARAN

1. Penyerapan Dana Prodama pada Sektor Ekonomi dengan Pengadaan barang Prodama sebaiknya yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan memaksimalkan UKMK yang ada di Kelurahan Bujel agar Perekonomian warga Kelurahan Bujel juga bisa meningkat.
2. Menganggarkan dana perawatan untuk program yang sudah terealisasi agar bisa digunakan oleh warga dengan jangka panjang.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat pada Prodama Plus yang akan dilaksanakan 2021 Supaya masyarakat Kelurahan Bujel dan juga Kelurahan di Kota Kediri lainnya dalam Prodama Plus masyarakat di tuntut untuk lebih mandiri dalam pengolahan dana dan juga Administrasi Prodama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan berkontribusi dalam penulisan artikel ini diantaranya:

- a) Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Negeri Surabaya.
- b) Ibu Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
- c) Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP dan Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen penguji.

- d) Kedua Orang tua yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
- e) Seluruh Jajaran Staff Kelurahan Bujel Kota Kediri.
- f) Untuk Snsd, Twice, Red Velvet, Nct, The boyz dan Iz*One yang memberikan semangat lewat karyanya untuk menyelesaikan penelitian ini.
- g) RizkiRou, Yustiana, Risnawa, Rendi dan Linda yang selalu membantu dan memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
- h) Dan teman teman S1 Ilmu Administrasi Negara 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Debby, C., & Ardini, L. (2019). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-Issn : 2460-0585. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Prodama Pemerintah Kota (Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur)*, 15.
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender And Capacity Building: A Multi-Layered Study Of Empowerment. *World Development*, 106, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Farhan A.A, dkk., A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Prodama (Studi Penelitian Di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Di Desa Tamanan Rt 01 Rw 03). *Qawānīn: Journal Of Economic Syariah Law*, 1(2), 38–67. <https://doi.org/10.30762/Q.V1i2.512>
- Heni Sulistiyowati, I. B. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Prodama Sebagai Upaya Peningkatan Sarana & Prasarana Lingkungan Di Kel Campurejo Kecamatan Mojovento Kota Kediri. *Jurnal Revitalisasi Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 07, Nomor 01, Maret 2018*, 07(1). <https://doi.org/10.1542/Peds.2006-2099>
- Ma'ruf, M. (2016). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah. *Journal Of Public Sector Innovation*, 1(1), 47–54.
- Magsi, H., & Torre, A. (2012). Social Network Legitimacy And Property Right Loopholes: Evidences From An Infrastructural Water Project In Pakistan. *Journal Of Infrastructure Development*, 4(2), 59–76. <https://doi.org/10.1177/0974930612465166>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/Jpp.V1i1.1621>

- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2), 1–13.
- Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2020). Produmas And The Effect On Infrastructure Growth, 123(Icamer 2019), 116–118. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200305.029>
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 (Desember 2014), 118.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3, 1–25.
- Wibisono, R., & Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.26740/Jpsi.V1n2.P55-58>
- Widjajanti, K. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan Model Pemberdayaan Masyarakat, 12.